



Catur Artha Jaya Bank Perkreditan Rakyat

No. : 073/CAJ/DIR/EX/IV/2022

Kudus, 26 April 2022

Lamp : 1 (satu) set.

Kepada Yth,

DPP PERBARINDO DAN MEDIA BPR

Di Tempat

**Perihal: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021
PT. BPR CATUR ARTHA JAYA**

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021 untuk Laporan posisi 31 Desember 2021.

Demikian kami sampaikan, mohon dapat diterima dengan baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR CATUR ARTHA JAYA



Supriyanto, S.E., M.M.

Direktur Utama &

Dir.Y.M.F. Kepatuhan

Kantor Pusat : Jl. Johar No. 107, Kudus 59318, Telp. (0291) 446279, 08157649184 Fax. (0291) 442102

E-mail : bprcaturarthajaya@gmail.com, Website : bprcaturartha.co.id

Kas Undaan : Jl. Kudus - Purwodadi Km. 15 Babalan, Telp. 081567705891

Kas Jekulo : Jl. Raya Kudus - Pati Km. 9 (Jl. Jensud No. 102) Jekulo, Kudus, Telp. 081567705892

Kas Gebog : Jl. PR. Sukun, Ds. Gondosari, Kec. Gebog, Kab. Kudus, Telp. 081567705893

Kas Mobil : Keliling Seluruh Wilayah Kabupaten Kudus

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Catur Artha Jaya

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

377923-1-PRBPRKS-R-S-20211231-010201-600875-26012022095350

Periode Data

S2 2021

User ID Petugas Pelaporan

vickky.bprcatur@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

20 / 20

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-01-26 09:53:50



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR CATUR ARTHA JAYA
TAHUN 2021**



**JL JOHAR NO. 107 KUDUS
TELEPON: 0291446279**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – Good Corporate Governance) pada PT. BPR Catur Artha Jaya pada tahun 2021 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. PT. BPR Catur Artha Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Catur Artha Jaya dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Catur Artha Jaya secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Catur Artha Jaya.

BPR Catur Artha Jaya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kesetaraan (Fairness). Hal ini didorong oleh komitmen Bank menjadi penyedia layanan perbankan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah, yang didukung oleh SDM yang handal agar dapat menciptakan nilai tambah bagi para nasabah atau masyarakat luas.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Supriyanto
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundangundangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>g. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>h. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>i. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang</p> <p>j. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;</p> <p>k. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan</p>			
2.	Nama	:	Pandi
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundangundangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate</p>			

Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.

d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.

e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.

b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.

c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Catur Artha Jaya.

d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan.

e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021.

f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Sinyo Bastian
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali: a). Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan b). Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.</p> <p>4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil</p>		

	<p>pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang: a). Pengaturan etika kerja; b). Waktu kerja; dan c). Pengaturan rapat.</p> <p>6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menjuk SPI dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.</p>	
2.	Nama	: Agus Tjondro Wijono
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali: a). Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan b). Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.</p> <p>4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang: a). Pengaturan etika kerja; b). Waktu kerja; dan c). Pengaturan rapat.</p> <p>6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menjuk SPI dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.</p>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat	
	Penjelasan Lebih Lanjut :	
	Nihil	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
-----	---------------------------------

1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Sampai dengan saat ini bank tidak memiliki komite karena modal inti Bank di bawah 80 milyar.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Supriyanto	Rp450.000.000,00	9%
2.	Pandi	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi yang memiliki saham pada BPR adalah Direktur Utama, dengan besar persentase 9%.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Supriyanto	-	-	0%
2.	Pandi	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
nihil				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Supriyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pandi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota direksi tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota dewan komisaris lainnya dan/ atau anggota Direksi bank atau pemegang saham pengendali bank.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Supriyanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pandi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sinyo Bastian	Rp1.250.000.000,00	25%
2.	Agus Tjondro Wijono	Rp450.000.000,00	9%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Agus Tjondro Wijono	600819	PT. BPR Adil Jaya Artha	15%
2.	Agus Tjondro Wijono	600127	PT. BPR Centra Kreditama	20%
3.	Agus Tjondro Wijono	-	PT. Energi Bumi Sakti	30%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah anggota Dewan Komisaris memiliki saham di 2 (dua) BPR dan 1 (satu) perusahaan lain.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sinyo Bastian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Agus Tjondro Wijono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sinyo Bastian	Tidak ada	Tidak ada	Ir Njoman Agung - Ayah Kandung, Tjandra Njoto Winarso - Paman (adik dari Ibu kandung)
2.	Agus Tjondro Wijono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Salah satu anggota dewan komisaris menjadi pemegang saham pengendali bank dan memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp582.000.000,00	2	Rp394.500.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp198.789.984,00	2	Rp2.289.984,00
3.	Tantiem	2	Rp59.004.853,00	2	Rp30.094.947,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp101.519.766,00	2	Rp62.269.246,00
Total			Rp941.314.603,00		Rp489.154.177,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Data Tantiem merupakan jasa produksi tahun 2020 dan remunerasi lainnya meliputi premi asuransi dan THR.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	kendaraan dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	bpjs (1), mandiri inhealth (2)	mandiri inhealth (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.96 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.99 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.07 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Februari 2021	2	1. Revisi Rencana Bisnis BPR Catur Artha Jaya untuk Tahun 2021 2. Peningkatan Kualitas Kredit 3. Target Laba
2.	25 Mei 2021	2	1. Target Rasio NPL 2. Monitoring terhadap kegiatan operasional BPR
3.	24 Agustus 2021	2	1. Peningkatan pengawasan terhadap kredit-kredit bermasalah. 2. Evaluasi pencapaian RBB.
4.	19 November 2021	2	1. Evaluasi data Laporan Keuangan BPR. 2. Realisasi Rasio NPL.
5.	10 Desember 2021	2	RBB tahun 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat dilaksanakan 5 (lima) kali dalam satu tahun.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Sinyo Bastian	5	0	100%
2.	Agus Tjondro Wijono	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan selalu dihadiri oleh semua anggota dewan komisaris.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Ir. Njoman Agung	Pemegang Saham	Supriyanto	Direktur Utama	Sewa gedung kantor pusat	200 juta rupiah	Biaya sewa gedung di jalan Johar yang merupakan jalan protokol di Kabupaten Kudus sesuai dengan nilai kewajaran di sekitar dan pembandingan, risiko benturan kepentingan dapat dimitigasi.
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Risiko benturan kepentingan dapat dimitigasi.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-----	---------------------	----------------------------------	---------------------	---------------	-------------

1.	19 Januari 2021	Sosial	Sumbangan untuk Panti Asuhan "Tresno Ing Siwi" Yayasan Penghibur, Kelet, Keling, Jepara.	Panti Asuhan "Tresno Ing Siwi" Yayasan Penghibur, Kelet, Keling, Jepara.	Rp2.500.000,00
2.	20 Januari 2021	Sosial	Sumbangan untuk 31 Rekening Tabungan Simpel Anak Yatim PT. BPR Catur Artha Jaya	31 Rekening Tab Simpel Anak Yatim PT. BPR Catur Artha Jaya	Rp2.499.995,00
3.	20 Januari 2021	Sosial	Sumbangan untuk Panti Asuhan "Budi Luhur" Kudus	Panti Asuhan "Budi Luhur" Kudus	Rp2.500.000,00
4.	20 Januari 2021	Sosial	Sumbangan untuk Pembangunan Musholla Baru "Darul Wahdah"	Musholla Darul Wahdah	Rp2.500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian Dana untuk kegiatan Sosial merupakan bentuk komitmen BPR untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian terhadap masyarakat.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Catur Artha Jaya
Alamat	: JL JOHAR NO. 107 KUDUS
Nomor Telepon	: 0291446279
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp7.222.567.467,00
Total Aset	: Rp99.061.899.405,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Catur Artha Jaya Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.60	0.320
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.78	0.267
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.45	0.245
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.20	0.220
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.80	0.045
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.57	0.257
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.10	0.158
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.35	0.176
Nilai Komposit			2.100
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.6)

Jumlah Direksi dua (2) orang, dengan Direktur Utama menjalankan Fungsi Kepatuhan dan telah terdapat pedoman dan tata tertib anggota Direksi

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.78)

Jumlah Dewan Komisaris dua (2) orang dengan melakukan pengawasan, pemantauan dan memberikan rekomendasi kepada Direksi sesuai Rapat Dewan komisaris

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti dibawah 50 milyar.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

BPR telah memiliki pedoman benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.45)

Bank sudah menunjuk Direktur Utama yang menjalankan Fungsi Kepatuhan, dan bank telah memiliki pedoman Fungsi Kepatuhan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)

Bank telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional Bank, serta bertanggung Jawab kepada Direktur Utama namun masih perlu pengembangan SDM dan peningkatan fungsi audit intern

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.8)

Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.57)

Bank telah memiliki Pejabat Fungsi Manajemen Risiko dan memiliki pedoman Manajemen Risiko serta laporan profil risiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.1)

Bank telah memiliki pedoman BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dilakukan evaluasi secara berkala.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis atau RKAT telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.35)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan, ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau " Baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip- prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan mengikuti ketentuan Permodalan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum BPR.
3. Fundamental Bank sekarang ini jauh lebih kuat disbanding tahun sebelumnya ditandai dengan penyaluran kredit yang meningkat dan lebih mandiri (bukan kepada Pihak Terkait) demikian juga dengan adanya Penambahan Modal semakin memperkuat fundamental Bank.

Kudus, 22 April 2022

PT. BPR Catur Artha Jaya

Menyetujui



Catur Artha Jaya
Bank Perkreditan Rakyat

Supriyanto S.E., M.M.
Direktur Utama dan Direktur YMK



S. Bastian, S.TP
Komisaris Utama